

Laporan Penelitian Individu

**Relevansi Kurikulum PAI Di Perguruan Tinggi Umum  
Dengan Kebutuhan Masyarakat Dan Peserta Didik  
Di Era Reformasi**



OLEH :

Disusun Oleh:

**Fakhruddin, M.Pd.I**

**DOSEN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) CURUP**

2017

## HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENELITIAN

1.	a. Judul Penelitian	:	Relevansi Kurikulum PAI Di Perguruan Tinggi Umum Dengan Kebutuhan Masyarakat Dan Peserta Didik Di Era Reformasi
	b. Jenis Penelitian	:	Ilmu Terapan
	c. Bidang Ilmu	:	Sosiologi Pendidikan
	d. Kategori Penelitian	:	Individu
2.	Peneliti		
	Nama Lengkap	:	Fakhruddin, M.Pd.I
	NIP	:	197501122006041009
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli/IIIb
	Jabatan Sekarang	:	Tenaga pengajar
3.	Lokasi Penelitian	:	STAIN Curup
4.	Jangka Waktu Penelitian	:	April s.d. September 2009

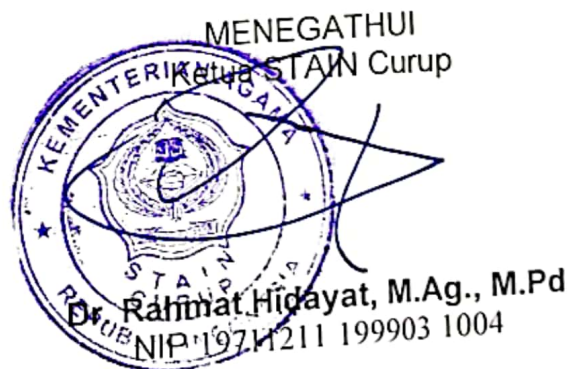
Curup, 1 Oktober 2017

Ketua Peneliti,



*[Handwritten Signature]*

Fakhruddin, M.Pd.I  
NIP 197501122006041009



## KATA PENGANTAR

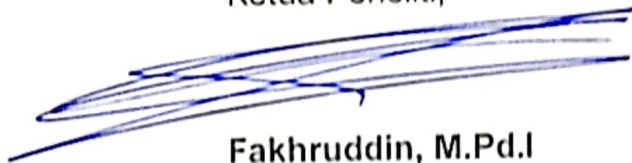
*Alhamdulillah* berkat rahmat Allah SWT laporan penelitian yang berjudul Relevansi Kurikulum PAI Di Perguruan Tinggi Umum Dengan Kebutuhan Masyarakat Dan Peserta Didik Di Era Reformasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan atas selesainya penelitian ini yang antara lain pada :

1. Bapak Ketua STAIN Curup yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian ini.
2. Kepala P3M STAIN Curup yang telah memberi dorongan untuk melaksanakan penelitian ini.

Semoga Allah membalas jasa baik semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Akhirnya kritikan dan masukan dari pembaca dan semua pihak dengan senang hati akan diterima demi penyempurnaan penelitian yang akan datang.

Curup, 1 Oktober 2017  
Ketua Peneliti,



**Fakhruddin, M.Pd.I**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar Peneliti	iii
Kata Pengantar Kepala P3M	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	
<b>Bab 1 Pendahuluan</b>	
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	7
Tujuan Kegunaan Penelitian	8
Metode Penelitian	9
Sistematika Penulisan	10
<b>Bab 2 Kajian Teoretis</b>	
Tinjauan Pustaka	11
Kerangka Teoretis	13
<b>Bab 3 Perbandingan Kurikulum PAI di PTU</b>	
Perbedaan Paradigma Kurikulum PAI di PTU	18
Perbedaan Materi Kurikulum PAI di PTU	27
<b>Bab 4 Relevansi Kurikulum PAI Dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peserta Didik</b>	
Relevansi Kurikulum PAI dengan Kebutuhan Masyarakat	39
Relevansi Kurikulum PAI dengan Kebutuhan Peserta Didik	43
<b>Bab 5 Penutup</b>	
Simpulan	50
Implikasi Penelitian	52
Daftar Pustaka	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan relevansi kurikulum PAI di PTU dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Data penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan kebijakan-kebijakan perubahan kurikulum dan dokumentasi, selanjutnya keseluruhan data dilakukan analisis pada setiap variabel-variabel penelitian*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konteks sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia pada masa awal era reformasi, yang diduga kuat berpengaruh terhadap perubahan kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum. Terdapat pergeseran paradigma pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum tahun 2002 bila dibandingkan dengan paradigma yang digunakan pada kurikulum tahun 2000 sebelumnya. Kurikulum PAI tahun 2000 memosisikan Islam sebagai doktrin, harus diimani, diterima tanpa kritik, dan merupakan barang jadi yang siap pakai. Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum tahun 2002, dengan muatan materi seperti yang disebutkan, sudah relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi sosio politik di masa awal era reformasi. Disamping itu, kurikulum tersebut juga relevan dengan kebutuhan peserta didik pada tingkat Perguruan Tinggi karena memiliki koherensi dengan materi kurikulum PAI pada tingkat SLTA sebelumnya.*

## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berakhirnya rezim orde baru yang kemudian digantikan dengan orde reformasi, melahirkan sejumlah perubahan pada tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, perubahan tersebut terkesan radikal sehingga tidak heran jika kemudian melahirkan implikasi-implikasi yang tidak diharapkan, reformasi diartikan oleh sebagian orang sebagai “segala hal yang berbeda dengan pola orde baru”. Pers, misalnya, setelah sebelumnya pada masa orde baru sangat terkekang dibawah kontrol Departemen Penerangan, di masa reformasi mendapat kebebasan yang seluas-luasnya. Eropia kebebasan pers ini pun pada akhirnya melahirkan keresahan baru, antara lain, dengan merebaknya majalah-majalah pornografi yang beredar secara luas, dan dipampang secara terang-terangan oleh pedagang-pedagang kaki lima.

Di sisi lain, implikasi perubahan struktur pemerintahan dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi, yang kemudian diperkuat melalui undang-undang tentang otonomi daerah, ternyata dipahami oleh beberapa kalangan dalam pengertian feodalisme dan pada akhirnya melahirkan isu tentang putra daerah dan non-putra daerah, dan hal ini

tidak bisa dipungkiri berpotensi melahirkan sedintegrasi bangsa, kasus Maluku dan Irian Jaya bisa dijadikan sebagai contoh. Seiring dengan lahirnya kebijakan tentang otonomi daerah tersebut, kasus-kasus korupsi dan kolusi pun menyebar dari pusat ke daerah, padahal pemberantasan korupsi ini merupakan salah satu agenda utama gerakan reformasi.

Perubahan drastis yang dihembuskan oleh gerakan reformasi, juga membuka “kran” kebebasan berpikir sehingga memberi peluang bagi kalangan intelaktual untuk mengeluarkan ide-ide yang semasa orde baru dianggap sangat “tabu”. Segera setelah lengsernya Suharto, buku-buku yang dicap “beraliran kiri” bermunculan, semisal *Pemikiran Karl Marx*, *Tan Malaka*, *Aku Bangga Menjadi Anak Komunis* dan sebagainya. Namun, kultur masyarakat kita tampaknya belum terlalu siap menerima perbedaan, sehingga tidak lama berselang setelah peluncuran buku-buku tersebut muncul reaksi dari beberapa kalangan yang melakukan *swiping* terhadap buku-buku yang dianggap “merusak” moral bangsa itu.

Contoh lain yang lebih ekstrim lagi, adalah “fatwa hukuman mati” oleh sebagian tokoh Islam atas Ulil Absar Abdallah, karena pemikiran-pemikirannya yang dianggap telah menyelewengkan kebenaran ajaran Islam.

Tampaknya, ditengah hiruk-pikuknya suara reformasi, masyarakat kita masih belum bisa melepaskan diri dari kultur orde

baru. Orde baru bukannya menanamkan persatuan, tetapi mewajibkan keseragaman hampir dalam segala hal, itulah mengapa, perbedaan selalu dinilai sebagai pelanggaran.

Dalam sebuah masyarakat yang pluralistik dari segi agama, ras dan budaya, seperti Indonesia, teramat sulit – untuk tidak menyebutkannya mustahil – menciptakan keseragaman. Kalau pun berhasil, keseragaman yang tercipta itu hanyalah sebuah keseragaman semu, keseragaman yang dipaksakan, sehingga berpotensi untuk punah manakala kekuatan pemaksa itu sudah tidak lagi “ditakuti”.

Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada aspek sosial, ekonomi dan politik, sebagai imbas dari gerakan reformasi tersebut, perlu dibarengi dengan perubahan kultural, jika tidak maka perubahan tersebut akan melahirkan instabilitas sosial, karena berpijak diatas pondasi yang rapuh. Namun, dalam hal ini diperlukan keseriusan dan kesabaran karena perubahan kultural tidak bisa berlangsung secara instant, tetapi membutuhkan waktu yang panjang.

Salah satu media yang paling tepat dalam upaya perubahan kultural ini adalah pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan tuntutan dan misi gerakan reformasi itu sendiri. Atas dasar inilah, maka pada tanggal 7 Nopember 1998 Forum Rektor di Bandung mendeklarasikan perlunya reformasi budaya melalui reformasi



Pendidikan. Lembaga Pendidikan, diharapkan dapat melakukan rekonstruksi pola pikir masyarakat.

Pendidikan, tentu saja, bukan hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi juga dilingkungan keluarga dan masyarakat. Bahkan dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa pola pikir masyarakat lebih banyak diwarnai oleh media massa. George Gerbner menyatakan : media massa telah turut memberi andil dalam memoles kenyataan sosial, bahkan media telah menjadi “agama resmi” masyarakat industri. Media massa telah ikut mempengaruhi perubahan bentuk masyarakat. Hal senada juga dilontarkan oleh Godan Hedebro bahwa media massa adalah pembentuk kesadaran sosial yang pada akhirnya menentukan persepsi orang terhadap dunia dan masyarakat tempat dimana mereka hidup.

Oleh karena itu, kita tidak bisa menggantungkan harapan kepada mass media untuk melakukan tugas kependidikan tersebut. Karena seperti yang kita lihat, mass media, disamping membawa banyak dampak positif ke arah perubahan pola pikir masyarakat, juga tidak sedikit dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya. Dan harus diingat bahwa media massa tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan komersial. Sementara di lain pihak, pemerintah tidak mungkin melakukan campur tangan terhadap program apa dan bagaimana yang ahrus disajikan oleh mass media, khususnya media

massa swasta, karena hal itu segera akan melahirkan kesan sebagai pengulangan dari kebijakan orde baru. Dan ironisnya lagi, publik yang menjadi konsumen media massapun sebagian besar “dinabobokkan” oleh media itu sendiri sehingga daya kritis mereka dilumpuhkan. Dengan demikian, harapan besar dalam upaya transformasi budaya dalam skala nasional, tampaknya harus bergantung pada lembaga-lembaga pendidikan formal karena dalam hal ini pemerintah masih cukup memiliki wewenang untuk melakukan rancangan program pendidikan secara sistematis dan terencana dalam bentuk kurikulum nasional. Namun, untuk menghindari terjadinya proses “indoktrinasi” dari pihak pemerintah melalui lembaga pendidikan, seperti yang terjadi pada masa orde baru, maka kontrol publik terhadap lembaga-lembaga pendidikan mutlak diperlukan.

Usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di era reformasi ini sudah mulai dilakukan, antara lain dalam bentuk peningkatan anggaran pendidikan dan rekonstruksi kurikulum. Terkait dengan rekonstruksi kurikulum ini, perlu kita cermati secara kritis, apakah perubahan kurikulum tersebut sudah berjalan dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat kita, ataukah perubahan tersebut hanya bagian dari euforia reformasi, sekedar ingin “tampil beda” dengan model kurikulum orde baru.

Salah satu sasaran utama dalam perubahan kurikulum tersebut adalah materi pendidikan agama, khususnya dalam Mata Kuliah

Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum, yang merupakan salah satu bagian dari Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian (MKPK).

Hal itu dapat dipahami mengingat bahwa agama merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam membentuk kesadaran, cara, pandang dan cara bersikap terhadap realitas. Di samping itu, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Ambon dan Poso di masa-masa dini orde reformasi, banyak melibatkan term dan simbol keagamaan.

Atas dasar itu, penelitian ini akan mengkaji perubahan kurikulum pendidikan yang terjadi pasca pemerintahan orde baru, atau dengan kata lain pada masa pemerintahan orde reformasi. Namun, tanpa bermaksud menapikan pentingnya pembahasan tentang kurikulum secara keseluruhan pada setiap jenjang pendidikan dan mata pelajaran (mata kuliah), dalam penelitian ini penulis membatasi diri untuk mengkaji pergeseran paradigma pada kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Pembatasan obyek penelitian ini dilakukan semata-mata karena keterbatasan waktu dan dana, disamping karena, alasan akademis penulis sebagai dosen Pendidikan Agama Islam pada Universitas Tadulako Palu.

Pada tahunm 2000, pemerintah, melalui Direktur Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 263/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan KURIKULUM Inti Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada

Perguruan Tinggi di Indonesia. Namun, tidak sampai dua tahun Dikti kembali melakukan perombakan terhadap kurikulum Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum melalui Surat Keputusan Nomor : 38/DIKTI/KEP/2002. Dalam kurikulum yang baru ini, tampak jelas terjadinya pergeseran paradigma yang berimplikasi pada perubahan materi yang cukup radikal dan kurikulum sebelumnya. Perubahan radikal yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat ini, menarik untuk dicermati. Persoalan inilah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pergeseran paradigma yang terjadi pada kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum?” Permasalahan ini akan dirinci ke dalam sub masalah berikut :

1. Bagaimana konteks sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia pada masa awal era reformasi, yang diduga kuat sebagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU?
2. Bagaimana perbedaan antara kurikulum PAI tahun 2002 tersebut dengan kurikulum PAI tahun 2000 sebelumnya ?

3. Bagaimana relevansi materi kurikulum PAI tahun 2002 tersebut dengan realitas sosial masyarakat Indonesia dan kebutuhan peserta didik?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisa kondisi sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia yang diduga kuat sebagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU tahun 2002.
2. Mengkaji perbedaan paradigma antara kurikulum PAI Tahun 2002 dengan kurikulum Pai tahun 2000 sebelumnya.
3. Mengevaluasi relevansi kurikulum PAI tahun 2002 tersebut dengan realitas sosial masyarakat Indonesia dan kebutuhan peserta didik, dalam hal yang kedua ini terutama akan dicermati koherensinya dengan materi Pendidikan Agama Islam di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan gambaran tentang hubungan yang sangat erat antara kurikulum dan realitas sosial yang mengitarinya. Sedangkan manfaat praktisnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam upaya evaluasi dan perbaikan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum.

## D. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisa secara kualitatif dan mendefenisikannya secara kualitatif pula. Penelitian kualitatif umumnya lebih longgar terhadap instrumen pengumpulan data dan lebih fokus pada proses dari pada produk suatu objek penelitian, sehingga kualitatif dilakukan berdasarkan pengumpulan data akurat melalui studi kepustakaan. Adapun teknik-teknik yang dipakai meliputi :

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Sumber data meliputi : buku-nuku literatur, dokumen, surat kabar, majalah, jurnal dan *web site* (internet) yang memuat informasi yang diperlukan. data yang terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya untuk persiapan analisa lebih lanjut.

### 2. Teknik Analisa Data

Data-data telah terkumpulan akan dianalisa dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi atau teks), yakni pengkajian terhadap tulisan-tulisan atau buku-buku secara cermat dengan berpijak pada syarat-syarat – sebagaimana yang dikemukakan

Noeng Muhadjir – Objektif, sistematis dan bersifat generalisasi. Generalisasi yang dimaksud adalah bahwa temuannya mempunyai sumbangan teoritik. Dalam proses analisa data ini digunakan logika induktif dan deduktif secara bervariasi, sebagaimana layaknya dalam penelitian kualitatif pada umumnya. Logika induktif yang dimaksud adalah proses pengambilan kesimpulan yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus kepada sebuah kesimpulan yang bersifat umum, sebaliknya, logika deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang bertolak dari konsepsi yang berlaku umum kepada sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

### 3. Metode Pendekatan

Ada tiga asas yang sangat urgen dalam penyusunan kurikulum, yaitu asas filosofis, asas sosiologis dan asas psikologis. Oleh karena itu, tak dapat dihindari, dalam penelitian ini akan digunakan tiga pendekatan, pertama pendekatan filosofis, karena pendidikan merupakan persoalan yang tak terlepas dari unsur-unsur yang bersifat normatif dan hal itu hanya dapat dicermati dengan pendekatan kurikulum dengan realitas sosial masyarakat. Dan yang ketiga pendekatan psikologis, terutama dalam mengkaji tentang relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik.



## **Bab 2**

### **Kajian Teoretis**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang kurikulum pendidikan secara umum sudah banyak dilakukan oleh para peneliti kependidikan, baik dalam bentuk *library research* maupun *field research*, dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Hal itu karena tak ada format kurikulum yang bersifat permanen dan berlaku umum di semua tempat dan waktu, melainkan selalu mengalami perubahan sesuai dengan konteks tempat dan masanya.

Salah satu faktor penting yang mesti diperhatikan adalah bahwa kurikulum harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang merupakan konsumen lembaga pendidikan. Hubungan yang demikian erat antara kurikulum dengan realitas sosial ini dipaparkan oleh John Dewey dalam karyanya antara lain : *The School and Society* dan *Democracy and Educatio*. Topik serupa juga dapat ditemukan dalam *School, Society and Proffesional educators* yang diedit oleh Frank H. Blackington dan robert S. Patterson, begitu pun dalam karya yang diedit oleh Nelson B. Henry, *Philosophies of Education*. Sedangkan relevansi antara kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, antara lain dapat ditemukan dalam karya Dewey, *The Child and the Curriculum*.

Pembahasan tentang kurikulum secara spesifik dan holistik juga terdapat dalam buku yang diedit oleh P.W. Musgrave, *Contemporary Studies in The Curriculum*.

Demikianlah, secara teoritis pembahasan tentang kurikulum sudah banyak ditemukan dalam berbagai literatur. Penelitian ini secara khusus mencermati Pergeseran paradigma pada kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) di Indonesia pasca pemerintahan orde baru, yang menurut pengamatan penulis belum pernah dilakukan. Karya-karya yang antara lain, disebutkan diatas karena dijadikan sebagai sumber landasan teoritis dalam penelitian ini. Sedangkan untuk mencermati bagaimana aplikasi teori-teori tersebut dalam rumusan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada PTU di Indonesia, khususnya pasca pemerintahan orde baru, penulis akan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang memuat data-data yang relevan. Sumber utama dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Dikti Nomor : 263/DIKTI/KEP/2000 dan Surat Keputusan Nomor : 38/DIKTI.KEP/2000 keduanya membahas tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

Disamping itu, untuk memperoleh gambaran tentang pendidikan dalam konteks masyarakat Indonesia pasca pemerintah orde baru, penulis akan memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang ada misalnya,

*Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, oleh H.A.R. Tilaar. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, oleh Anwar Arifin; *Pengantar Pendidikan : Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada umumnya dan Pendidikan di Indonesia* oleh Redja Mudyaharjo; dan karya-karya lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

## **B. Kerangka Teoritis**

Perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi dari perubahan situasi dan kondisi masyarakat tempat berlangsungnya pendidikan. Arthur K. Ellies, dkk, mengklasifikasikan beberapa kategori yang berpengaruh terhadap kurikulum, yaitu :

1. Individu-individu yang terlibat dalam komunitas sebuah lembaga pendidikan.
2. Kepentingan-kepentingan kelompok yang diorganisasikan secara khusus
3. kepentingan-kepentingan komerdial
4. Para penggagas informasi dan ide-ide baru
5. Perubahan kondosi ekonomi dan masyarakat
6. Organisasi-Organisasi profesi dan masyarakat terpelajar
7. Evaluasi dan akreditasi eksternal sejalan dengan hal tersebut, perubahan sistem pemerintahan memiliki implikasi yang sangat

besar terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam hal ini kurikulum. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan, sistem birokrasi dan orientasi politik turut mewarnai corak kurikulum yang ada. Dalam konteks Indonesia, khususnya pasca pemerintahan orde baru, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan sistem ketatanegaraannya. Peralihan dari bentuk pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik, perubahan iklim demokrasi, menguatnya isu tentang Hak Asasi Manusia, pengakuan yang lebih tegas terhadap pluralisme budaya, agama dan ras, semua itu berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Di samping itu, pada tatanan masyarakat global budaya konsumerisme semakin meningkat seiring dengan munculnya budaya global. Konsumerisme akan menjadi suatu wabah penyakit baru yang menjangkiti manusia abad 21. dalam hidup yang baru yang serba konsumtif ini dapat muncul quasi religions yang sebenarnya merupakan pelarian dari ketidakberdayaan manusia terhadap perubahan-perubahan yang cepat serta dangkal sehingga meniadakan makna hidup yang sebenarnya.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi sebagai *agent of social change* harus mampu menyiapkan manusia-manusia yang bukan hanya cakap di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,

tetapi juga manusia-manusia yang memiliki kematangan psikologis dan spiritual.

Untuk merespon hal tersebut, dalam sistem pendidikan nasional, khususnya di era reformasi, dibentuk kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) pada Perguruan Tinggi Umum, dimana Pendidikan Agama sebagai salah satu komponen utamanya. Meskipun Pendidikan Agama itu sendiri telah ada sejak masa orde baru sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Umum (MKU), namun karena tuntutan situasi dan kondisi serta kebijakan pemerintah pada era reformasi berbeda dengan era sebelumnya, maka paradigma yang dikembangkan pun berbeda.

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum (PTU) memperoleh landasan yang kokoh sejak dikeluarkannya Tap. MPRS No. II Tahun 1960 dan UU. Perguruan Tinggi No. 22 1961, yang mewajibkan pengajaran mata kuliah agama di perguruan tinggi negeri. Dengan ketetapan tersebut, eksistensi PAI sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa semakin kuat.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan PAI secara efektif, efisien dan menarik, pemerintah telah mengusahakan berbagai perbaikan seperti kurikulum, metode dan sistem pembelajaran, penyempurnaan materi dan penyediaan sarana prasarana yang mencukupi.

Sebagai bahan dari kurikulum inti perguruan tinggi, mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentu tidak lepas dari kontrol pemerintah. Kurikulum Pendidikan Agama Islam, dengan demikian tidak bisa lepas dari kepentingan politik yang sedang berkembang pada saat mana kurikulum itu diberlakukan. Sehingga, perbedaan orientasi, visi dan misi sebuah rezim pemerintahan, akan berimplikasi pada muatan kurikulum Pendidikan Agama Islam itu sendiri.

Pada masa Orde Baru, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum berorientasi murni pada konsep-konsep dasar ajaran Islam normatif. Domain pembahasan mata kuliah Pendidikan Agama Islam meliputi tiga pilar utama ajaran Islam yakni Akidah, Syariah dan Akhlak. Inilah yang dijabarkan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di PTU.

Apakah kurikulum yang demikian masih tetap dipertahankan di era Reformasi? Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hingga tahun 2002 muatan kurikulum Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum masih meneruskan materi yang telah diterapkan pada masa Orde Baru meskipun mata kuliah ini telah dimasukkan sebagai salah satu kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

Namun, sejak tahun 2002 muatan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum mengalami perubahan yang cukup drastis.

Pada bagian berikut, akan diuraikan tentang bagaimana perbedaan yang ada antara kurikulum PAI di PTU tahun 2000 dengan kurikulum Pai di PTU tahun 2002.



## **Bab 3**

### **Perbandingan Kurikulum PAI Di PTU**

#### **A. Perbedaan Paradigma Kurikulum PAI di PTU**

Pada dasarnya, penulis tidak menemukan referensi khusus yang membahas tentang paradigme kurikulum PAI, baik kurikulum tahun 2000 maupun kurikulum tahun 2002. Oleh karena itu, dalam membahas masalah ini, penulis melakukan analisa terhadap tujuan dan materi PAI pada kedua kurikulum tersebut untuk menemukan spirit yang dikandungnya dan menjiwai pelaksanaan pembelajaran. Sehingga dengan demikian kita dapat menemukan paradigma pemikiran yang melatarinya.

##### **1. Paradigma Kurikulum PAI di PTU Tahun 2000**

Kepmen Diknas Nomor : 232/U/2000, menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa. SK ini menjadi dasar penyelenggaraan program studi di Perguruan Tinggi yang terdiri atas (a) kurikulum inti, dan (b) kelompok intruksional. Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi terdiri atas (a) Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); (b) Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB); kelompok Matakuliah Berkehidupan

Bermasyarakat (MBB). Mata kuliah Pendidikan Agama termasuk dalam kelompok MPK seperti halnya PPKN.

Seiring dengan itu, dalam rumusan penyempurnaan kurikulum mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum, dijelaskan :

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berfikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia dan nasional.

Rumusan diatas tampak berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam kurikulum Pai di masa Orde Baru. Sebagaimana dideskripsikan dalam GBPP PAI bahwa mata kuliah Pai bertujuan :

Mengkaji dan memberi pemahaman tentang hakikat manusia yang membutuhkan panduan hidup, baik secara individu maupun sosial dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahami dirinya dan alam semesta yang telah diberi aturan oleh Penciptanya, aturan itulah yang disebut ayat kauniyah dan tanziliah. Ayat tanziliah inilah

yang dirinci pada bahasa aqidah, syariah, akhlak dan sejarah Islam. Penekanan utama bersumber dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah saw.

Meski demikian pada aspek materi, penyempurnaan kurikulum Pai tahun 2000 tidak berbeda sama sekali dengan materi kurikulum Pai di masa Orde Baru. Titik tekan materi PAI lebih berorientasi pada konsep-konsep keislaman tradisional, yang berkisar pada akidah, syariah (dalam arti fiqh) dan akhlak. Di samping itu, dalam sejumlah hal tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara materi kurikulum PAI pada Perguruan Tinggi dengan kurikulum mata pelajaran Agama Islam pada Tingkat Dasar dan Menengah. Meskipun ada perkembangan materi pada tingkat perguruan tinggi, tapi perkembangan tersebut lebih bersifat vertikal yakni materi yang telah dipelajari tingkat sebelumnya lebih dipertajam, dengan pendekatan rasional filosofis. Akan tetapi tidak ada perkembangan yang bersifat horizontal, dalam memperluas wilayah kajian pada isu-isu kontemporer.

Dengan kondisi yang demikian, tidak dapat dihindari dominannya pendekatan doktriner dalam proses pembelajaran PAI tersebut. Ajaran agama sebagai sesuatu yang harus diimani, diterima tanpa kritik, dan merupakan barang jadi yang siap pakai.

Paradigma kurikulum Pendidikan Agama Islam tahun 2000 tersebut masih merupakan kelanjutan dari paradigma kurikulum Orde Baru. Wilayah keislaman terkesan begitu sempit, seputar rukun iman dan rukun Islam ditambah dengan seperangkat aturan tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Konsep keagamaan, dengan demikian, cenderung bersifat statis, sekedar melanjutkan tradisi teologis dari para ulama terdahulu.

Mungkinkah paradigma yang demikian ini sengaja ditanamkan penguasa pada masa Orde Baru guna meredam kekuatan oposisi yang bisa lahir dari pemahaman keagamaan yang dinamis. Kecurigaan seperti ini tentu cukup beralasan, mengingat kurikulum merupakan produk dari penguasa, dan bahwa umat Islam dalam sejarah Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang sangat diperhitungkan.

## 2. Paradigman Kurikulum Pai di PTU Tahun 2002

Perubahan iklim politik di Indonesia pada masa-masa awal Orde Reformasi, konflik di berbagai daerah seperti yang telah dipaparkan pada bab II yang lalu, serta lahirnya semacam fobia terhadap segala yang berhubungan dengan Orde Baru, semua itu berimplikasi terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam hal ini kurikulum PAI di PTU.

Oleh karena itu, jika pada konsep penyempurnaan kurikulum Pai tahun 2000 paradigma yang digunakan masih merupakan warisanm Orde Baru, maka pada kurikulum 2002 paradigmanya sangat berbeda. Mata kuliah PAI di PTU tidak lagi berbicara tentang rukun iman dan rukun Islam belaka (bahkan untuk materi ini porsinya sangat minim), melainkan cenderung lebih dominan mengkaji tentang Islam dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer, seperti Hak Asasi Manusia, demokrasi, hukum, sistem politik, masyarakat madani dan toleransi antar umat beragama.

Dalam Surat keputusan Dikti Nomor 38 Tahun 2002 dinyatakan bahwa : “Visi Matakuliah Kelompok Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantar mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

Misi utamanya adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Selanjutnya, kompetensi dasar yang ditargetkan adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Sedangkan

untuk tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum, adalah :

Mengantarkan mahasiswa sebagai modal (kapital) intelektual melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk menjadi ilmuwan yang berkepribadian dewasa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan.

Dalam rumusan diatas, tidak lagi ditemukan term “iman” dan “takwa” sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum sebelumnya. Sehingga jika rumusan tersebut dibaca tanpa melihat judulnya, tentu tidak ada kesan yang mencerminkan bahwa itu merupakan rumusan tujuan mata kuliah PAI.

Namun, dalam materi instruksional Pai yang diterbitkan oleh Dipertais Departemen Agama RI pada tahun 2004 ditegaskan bahwa kompetensi PAI sebagai berikut :

Mengantar mahasiswa untuk :

- a. Menguasai ajaran Agama Islam dan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman serta landasan berfikir dan berperilaku dalam menerapkan ilmu dan profesi yang dikuasainya.
- b. Menjadi “intellectual capital” yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berakhlak mulia dan berkepribadian Islami.

Paradigma yang mendasari kurikulum PAI tahun 2002 ini adalah paradigma yang melihat agama sebagai sesuatu yang dinamis dan hidup dalam setiap aspek kehidupan. Agama bukanlah sekedar seperangkat aturan normatif untuk memenuhi kebutuhan spriritualitas manusia. Agama adalah sebuah pandangan hidup, dan dengan demikian, agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang terhadap realitas kehidupan. Dan karena realitas selalu dalam proses perubahan maka konsep keagamaan haruslah bersifat dinamis dalam merespon kondisi kekinian.

Krisis multidimensi yang melanda Indoneaia di era reformasi, sebagaimana telah dipaparkan pada Bab II yang lalu, menghendaki lahirnya perubahan paradigma dalam berbangsa dan bernegara. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, penegakan demokrasi, supremasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat sipil, merupakan agenda penting reformasi yang meati “dibudidayakan” melalui pendidikan.

Disamping itu, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di tanah air, menuntut peninjauan ulang terhadap cara pandang kita terhadap pluarism agama, budaya, suku dan etnik. Yang dibutuhkan adalah kesepahaman dalam perbedaan dan bukannya menciptakan keseragaman dalam keragaman sebagaimana yang dilakukan di masa Orde Baru.



Atas dasar itu, muncullah konsep pendidikan agama yang berwawasan kultural, seperti yang ditawarkan Zakiyuddin Baidhawiy dalam bukunya *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Konsep ini menawarkan pendekatan dialogis untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, dibangun atas semangat kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami, menghargai persamaan, perbedaan, keunikan dan independensi. Model pendidikan semacam ini memberikan konstruk baru yang bebas dari prasangka dan stereotip mengenai agama orang lain, bebas dari bias dan diskriminasi atas nama apapun, baik itu agama, jender, ras, warna kulit, kebudayaan, maupun kelas sosial.

Zakiyuddin Baidhaqy, dalam buku tersebut menegaskan bahwa :

Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia, termasuk mereka para penganut agama-agama menuju satu cita-cita bersama kesatuan manusia (*united of mankind*) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan dan agama. pesan kesatuan ini secara tegas disinyalir dalam Alquran : “Katakanlah wahai semua penganut agama (dan kebudayaan), bergegaslah menuju dialog dan perjumpaan multikultural *9kalimatun*

sawa) antara kami dengan kalian. “*Kalimatun sawa*” bukan hanya mengakui pluralitas kehidupan, ia adalah manifesto dan gerakan yang mendorong kemajemukan (*plurality*) dan keragaman (*diversity*) sebagai intik kehidupan dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok multikultural diperlakukan setara (*equality*) dan sama martabatnya (*dignity*).

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa klaim berlebihan tentang kebenaran absolut kelompok keagamaan sendiri dan klaim kesesatan atas kelompok-kelompok agama lain, berpotensi meningkatkan sentiment permusuhan antar umat beragama, pengabjur-penganjur dengan pendekatan teologis dogmatis semacam ini dapat dengan mudah membawa dan memicu konflik dan kekerasan pada level pengikut. Dan anehnya, semua mengatasnamakan Tuhan.

Pendekatan Multikultural dalam pendidikan agama mendapat dukungan luas dari kalangan akademis, sebagai sebuah pendekatan yang tepat dalam merespon konteks sosial masyarakat Indonesia yang pluralis. Azyumardi Azra, misalnya, menyatakan bahwa pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi keragaman demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Lebih lanjut,

beliau menyatakan bahwa buku yang ditulis oleh Zakiyuddin Baidhawiy tersebut memiliki arti penting dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama.

Demikianlah, bila dibandingkan dengan kurikulum tahun 2000, dapat dilihat bahwa telah terjadi pergeseran paradigma yang sangat tajam pada kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum tahun 2002. Kepentingan politik, tentu saja memiliki andil dalam hal ini. Penulis beranggapan bahwa pembaruan kurikulum ini, disamping diperuntukkan untuk menyukseskan agenda reformasi dalam hal penegakan HAM, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil, serta memupuk kesadaran akan pluralisme, juga untuk meredam lahirnya kelompok-kelompok radikal yang berbasis Islam. Seperti diketahui, isu terorisme yang ditujukan kepada kelompok-kelompok Islam “radikal” di Indonesia, merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian ekstra serius dari pemerintah Indonesia di era reformasi. Bahkan kelompok-kelompok Islam “radikal” di Indonesia mendapat “pengawasan khusus” dari dunia internasional.

## **B. Perbedaan Materi Kurikulum PAI di PTU**

### **1. Materi PAI PTU pada Kurikulum Tahun 2000**

Pada penyempurnaan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, sesuai dengan Keputusan Dikti Nomor : 263 tahun 2000, materi pembahasannya terdiri dari 9 pokok bahasan dengan beberapa sub bahasan masing-masing, sebagaimana yang terlihat pada tabel 1.

Materi yang disajikan masih terkonsentrasi pada tiga domain utama ajaran Islam, yakni Aqidah, syariat dan akhlak. Tampak jelas adanya pengulangan dari menteri Pendidikan Agama Islam pada tingkat dasar dan menengah, sehingga pada dasarnya materi PAI di tingkat perguruan tinggi dapat dianggap sebagai pematangan dari materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang telah dipelajari sebelumnya pada tingkat SLTA di bawah. Perbedaan yang tampak hanya pada aspek penghayatan terhadap nilai-nilai (hikmah) yang terkandung dalam ajaran Islam itu, seperti hukum shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan yang terkait dengan akidah masih berkisar pada persoalan rukun iman.

**MATERI POKOK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DI PERGURUAN TINGGI  
UMUM BERDASARKAN SK. SIKTI NO. 263 TAHUN 2000**

No	Pokok Bahasan	Sub Bahasan
1.	Manusia dan Agama	a. Macam-macam ciptaan Allah b. Manusia makhluk Allah yang paling sempurna c. Kebutuhan manusia akan

		pedoman hidup
2.	Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Macam agama dan kedudukan agama Islam</li> <li>b. Peranan agama Islam dalam menentramkan batin dan membawa kedamaian</li> </ul>
3.	Sumber Ajaran Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistematis sumber ajaran Islam</li> <li>b. Penggunaan akal sebagai sumber ajaran Islam</li> </ul>
4.	Kerangka Dasar Ajaran Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aqidah, syariat dan akhlak</li> <li>b. Agama Islam dan Ilmu-ilmu keislaman</li> <li>c. Filsafat, tasawuf dan pembaharuan dalam Islam</li> </ul>
5.	Aqidah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Arti dan ruang lingkup aqidah</li> <li>b. Kemaha-esaan Allah</li> <li>c. Kiamat, hukum alam dan akhirat</li> <li>d. Peranan malaikat dan amhluk gaib lainnya serta pengaruhnya terhadap manusia</li> <li>e. Tugas dan peranan nabi dan rasul</li> <li>f. Fungsi kitab suci yang dibawa rasul bagi umatnya</li> <li>g. Pengertian qadha dan qadar</li> </ul>
6.	Syariah, Ibadah dan Muamalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian dan ruang lingkup syariat Islam</li> <li>b. Pengertian, tujuan, kedudukan dan hikmah ibadah dalam Islam</li> </ul>

No	Pokok Bahasan	Sub Bahasan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Arti shalat dan hikmahnya bagi kehidupan</li> <li>d. Pelaksanaan dan hikmah puasa</li> <li>e. Pelaksanaan dan hikmah zakat</li> <li>f. Pelaksanaan dan hikmah haji</li> <li>g. Mu'amalah dalam Islam</li> <li>h. Kewarisan dalam Islam</li> <li>i. Prinsip kerja sama umat</li> </ul>

7.	Akhlak	beragama a. Pengertian dan ruang lingkup akhlak yang menghormatinya HAM, serta perbedaannya dengan moral dan etika. b. Akhlak terhadap Allah, manusia dan HAM serta lingkungan hidup.
8.	Taqwa	a. Pengertian, ruang lingkup dan kedudukan taqwa yang menghormati HAM b. Hubungan manusia dengan Allah c. Hubungan manusia dengan sesama manusia d. Hubungan manusia dengan diri sendiri e. Hubungan manusia dengan lingkungan hidup
9.	Ilmu Pengetahuan dalam Islam	a. Kedudukan akal, wahyu dan ilmu dalam Islam b. Klasifikasi dan karakteristik ilmu dalam Islam c. Kewajiban menuntut ilmu d. Disiplin ilmu dalam Islam

Sumber data : Keputusan Dikti Nomor : 263/DIKTI.KEP/2000

tentang penyempurnaan kurikulum inti Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Depdiknas, 2000.

Meskipun persoalan HAM telah disinggung dalam materi kurikulum PAI tahun 2000 tersebut, namun tidak dikaji secara

mendalam melainkank sekedar pelengkap dalam materi pembahasan tentang kahlak dan taqwa.

Dengan memperhatikan pokok bahasan dan sub pokok bahasan pada tabel 1 diatas, dapat dipahami bahwa mata kuliah PAI dalam kurikulum tahun 2000 lebih banyak menggunakan pendekatan teologis doktriner.

Bila materi PAI seperti itu, pengulangan dari materi-materi yang telah dipelajari di tingkat dasar dan menengah, maka akan melahirkan pemahaman keagamaan yang sempit dalam benak mahasiswa, seakan-akan tidak ada lagi materi keagamaan lain di luar persoalan akidah, syariat dan akhlak (dalam makna tradisional). Padahal materi keislaman semestinya mengandung makna yang luas dan dinamis.

## 2. Materi PAI di PTU pada Kurikulum Tahun 2002

Berbeda dengan kurikulum PAI sebelumnya, dalam kurikulum PAI tahun 2000 materi yang disajikan lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di era reformasi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan pokok bahasan dan sub bahasan dalam mata kuliah PAI di PTU sesuai yang diamanahkan dalam Keputusan Dikti No.38 tahun 2002, tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian

di Perguruan Tinggi, pada pasal 4 dijelaskan tentang dasar substansi kajian mata kuliah Pendidikan Agama, yaitu :

a) Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan

- Keimanan dan ketaqwaan
- Filsafat ketuhanan (teologi)

b) Manusia

- Hakekat dan martabat manusia
- Tanggung jawab manusia

c) Moral

- Implementasi iman dan taqwa dalam kehidupan sehari-hari

d) Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

- Iman, ilmu, amal sebagai kesatuan
- Kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu
- Tanggung jawab ilmuwan terhadap dan lingkungan

e) Kerukunan antar umat beragama

- Agama merupakan rahmat bagi semua
- Hakekat kebersamaan dalam pluralitas beragama

f) Masyarakat

- Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera
- Tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi



g) Budaya

- Tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan cara berpikir kritis, bekerja keras dan bersifat *fair*

h) Politik

- Kontribusi agama dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara

i) Hukum

- Menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan
- Peran agama dalam perumusan dan penegakan hukum yang adil
- Fungsi profetik agama dalam hukum

Dasar substansi pokok bahasan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam pokok bahasan dalam mata kuliah Pendidikan Agama untuk masing-masing agama, artinya Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi memiliki topic yang sama pada masing-masing agama, topic itulah yang akan diterjemahkan berdasarkan konsep atau persepsi dari setiap agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2004 Dipertais Depag menerbitkan buku pedoman *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Dalam buku ini terdapat 9 materi pokok yang

selanjutnya diuraikan dalam beberapa sub bahasan, sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 2 berikut ini :

**MATERI POKOK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DI PERGURUAN TINGGI  
UMUM BERDASARKAN SK. SIKTI NO. 38 TAHUN 2001<sup>1</sup>**

<b>No</b>	<b>Pokok Bahasan</b>	<b>Sub Bahasan</b>
1.	Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan	a. Filsafat ketuhanan dalam Islam b. Keimanan dan ketaqwaan c. Implementasi iman dan taqwa dalam kehidupan modern
2.	Hakekat Manusia Menurut Islam	a. Konsep Manusia b. Eksistensi dan martabat manusia c. Tanggung jawab manusia
3.	Hukum, HAM dan Demokrasi dalam Islam	a. Hukum Islam merupakan bagian dari Agama b. Ruang Lingkup Hukum Islam c. Tujuan hukum Islam d. Sumber hukum Islam e. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia f. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat g. HAM menurut ajaran Islam h. Demokrasi dalam Islam
4.	Etika, Moral dan Akhlak	a. Konsep etika, moral dan akhlak b. Hubungan tasawuf dengan akhlak c. Indikator manusia berakhlak d. Akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan
<b>No</b>	<b>Pokok Bahasan</b>	<b>Sub Bahasan</b>
5.	Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni	a. Konsep ipteks dalam Islam b. Integritas, iman, ilmu dan amal c. Keutamaan orang beriman dan

<sup>1</sup> Disadur dari : Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, *op.cit.*  
h. ix-x

		berilmu d. Tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam dan lingkungan
6.	Kerukunan antar umat beragama	a. Agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam b. Ukhuwah islamiyah dan ukhuwan insaniyah c. Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial
7.	Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat	a. Konsep masyarakat madani b. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani c. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat d. Manajemen zakat e. Manajemen wakaf
8.	Kebudayaan Islam	a. Defenisi kebudayaan Islam b. Sejarah intelektual Islam c. Nilai-nilai dalam budaya Indonesia d. Masjid sebagai pusat peradaban Islam
9.	Sistem Politik Islam	a. Pengertian politik Islam b. Nilai-nilai dasar sistem politik dalam Alquran c. Ruang lingkup pembahasan siyasah dustriyah

Uraian materi Pai diatas menunjukkan wawasan yang lebih luas sebagai sebuah pandangan hidup yang dinamis dan selalu berdialog dengan konteks sosial. Tidak lagi mengulang-ulang materi pelajaran SLTA ke bawah yang terbatas pada persoalan-persoalan rukun iman dan rukun Islam, sebagaimana halnya pada kurikulum tahun 2000.

Pendidikan Agama Islam di era sekarang, sebagaimana diungkap al-Faruqi, dihadapkan kepada perubahan yang mendasar, terutama mempersiapkan peserta didik yang nantinya akan berintegrasi dengan masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya dan agama. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sebuah proses pendidikan agama, ada dua hal sebagai “pekerjaan rumah (PR)”, terutama pendidik agama Islam, yakni : para pendidik tersebut sudah saatnya butuh pengertian yang mendalam dan harus merasa peka terhadap isu-isu pemahaman keagamaan yang sedang berkembang dalam masyarakat umum. Baru kemudian, para pendidik ini harus bisa membantu peserta didik untuk menyadari pentingnya memahami budaya yang bermacam-macam dalam masyarakat, khususnya dibidang keagamaan.

Jika tidak demikian, tampaknya lembaga pendidikan, sulit berpartisipasi dalam menengahi model-model pemahaman Islam radikal yang sering dituduh sebagai penyulut munculnya ketidaknyamanan dalam masyarakat beragama. Lembaga-lembaga pendidikan, terutama di masa akan datang, harus bisa memproduksi sarjana Islam yang berpikiran moderat untuk mewedahi berbagai macam pemahaman yang cenderung radikal itu. Untuk mengujudkan itu, seluruh unsur sistem

pendidikan Islam, khususnya pembelajaran agama Islam, sebaiknya ditelaah kembali.

Berbagai upaya untuk mengembangkan materi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum saat ini terus digalakkan dengan mengacu pada spirit yang terkandung dalam kurikulum 2002 tersebut. Salah satu diantaranya adalah Pendidikan Agama Islam yang berwawasan multikultural.

Namun, perlu kehati-hatian dalam menggunakan pendekatan multikultural ini dalam pengajaran Pendidikan Agama Islam. Istilah pendidikan berwawasan multikultural sendiri memiliki akar historis dengan *setting* sosial masyarakat Amerika yang pada awalnya diwarnai oleh sistem pendidikan yang mengandung pemerintah. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem pendidikan (Islam) yang ditemukan di Asia, terutama Indonesia, yang sejak awal tidak begitu menampakkan diskriminasi radikal di dalam kelas. Perbedaan ruang kelas antara pria dan wanita pada lembaga-lembaga tertentu pada lembaga Pendidikan Islam misalnya, tidak bisa langsung diartikan sebagai tindakan diskriminatif, karena yang demikian lebih dimaknai sebagai antisipasi terhadap pelanggaran moral baik dalam pandangan Islam dan kultur masyarakat. Pendidikan Islam multikultural di sini lebih diartikan sebagai sistem pengajaran yang lebih memusatkan perhatian kepada ide-ide

dasar Islam yang membicarakan betapa pentingnya memahami dan mengjormati budaya dan agama orang lain.

*Over acting* dalam memahami dan menerapkan sistem pendidikan yang berwawasan multikultural juga bisa berdampak negatif pada melemahnya keimanan para anak didik, apalagi di Perguruan Tinggi Umum yang *basic* keagamanya pas-pasan. Konsep pendidikan agama berwawasan multikultural hanya dimungkinkan apabila peserta didik telah matang dalam memahami prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Jika tidak maka yang akan terjadi bukannya pendidikan agama, tetapi meminjamkan ungkapan Adian Husaini, merusak pendidikan agama melalui penyesatan pemikiran.

## **Bab 4**

### **RELEVANSI KURIKULUM PAI TAHUN 2002 DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PESERTA DIDIK**

#### **A. Relevansi Kurikulum PAI dengan Kebutuhan Masyarakat**

Pembahasan tentang relevansi kurikulum PAI dengan kebutuhan masyarakat, tidaklah dimaksudkan dengan meminta tanggapan langsung dari warga masyarakat, melainkan dengan melihat relevansinya dengan tuntutan situasi dan kondisi sosial, politik dan budaya masyarakat di masa awal era reformasi ini, sebagaimana telah dijelaskan garis besarnya pada bab II terdahulu.

Benturan berbagai ide yang melibatkan elemen-elemen Islam sejak bergulirnya era reformasi muncul dalam berbagai aspek sosial, keagamaan dan politik. Dalam hal ini yang mengemuka antara lain menanggapi soal perempuan jadi presiden, pemberlakuan syariat Islam, keabsahan demokrasi, pluralisme beragama, makna jihad, hingga persoalan-persoalan politik dan teologi yang lain. Proses dinamis dalam perkembangan kontemporer Islam di Indonesia dan perwajahan baru radikalisme dalam gerakan Islam yang semakin meningkat tentu saja menarik untuk dicermati secara seksama.

Baju radikalisme dan fundamentalisme yang dipakai atas nama Islam oleh kelompok tertentu menjadi “boomerang” bagi umat Islam sendiri. Di Indonesia, kedua aliran itu telah menggejala baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Fenomena demikian menyebabkan kekhawatiran berbagai kalangan masyarakat, sebab alur pemikiran semacam itu telah merasuki anak-anak, pelajar dan mahasiswa.

Dalam situs GP Anshor dikemukakan bahwa : Momok ekstrem kanan yang dulu begitu diwaspadai oleh Orde Baru kini hilang dari kamus politik Indonesia. Kelompok Islam radikal memang berhasil “ditumpas” rezim Orde Baru pada tahun 1980-an. Namun, dalam waktu hampir bersamaan generasi dibawahnya diam-diam membangun jaringan di kampus-kampus. Kemudian disusul dengan munculnya kelompok-kelompok pengajian kampus pada akhir 1980-an yang terkenal dengan sebutan “kelompok tarbiyah”, melalui kelompok inilah tramisi Islam radikal di Timur Tengah berkembang di Indonesia, khususnya di **kampus-kampus umum** (bold-italik dari penulis).

Setelah era reformasi mereka lebih berani tampil ke permukaan secara terang-terangan. Bagi sebagian kalangan, kemunculannya dianggap mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena perbedaan ideologis, tetapi lantaran sebagian diantaranya menggunakan cara-cara kekerasan memperjuangkan aspirasinya.



Kekerasan disini tak hanya dalam rti fisik tetapi juga kekerasan wacana yang terekspresi melalui kecenderungan mereka dengan mudah mengeluarkan fatwa murtad, kafir, syirik dan semacamnya bahkan kepada sesama Muslim.

Kita sadari bahwa Indonesia adalah negara plural yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, budaya yang berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia. Pluralisme yang menjadi ciri bangsa dan Negara Indonesia ini, semestinya gejala baru yang berkembang. Islam sebagai Agama yang *rahmatan lil Alamin* seyogyanya dimaknai oleh penganutnya dengan penuh keramahan, kedamaian dan kasih sayang menyeramkan dan menakutkan bagi umat lain, sehingga performen keseluruhan umat Islam pun turut terpengaruh. Arogansi, kepongahan serta kecongkakan yang mementingkan keinginan kelompoknya masing-masing adalah benuh dari sebuah bentuk radikalisme. Karena di era global sekarang ini wajah seram semacam itu, tak boleh lagi tumbuh berkembang.

Berdasarkan hasil survery yang dilakukan oleh the Wahid Institute tentang persepsi umat Islam Indonesia terhadap agama Islam dan isu terorisme, diperoleh data bahwa sebanyak 2,7 persen dari responden percaya bahwa terorisme dibolehkan dalam ajaran Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pokoknya berpijak pada asumsi-asumsi pluralism. Dan meskipun

angka 2,7 persen itu kecil, tapi jumlah penduduk yang mencapai sekitar 130 juta maka angka tersebut cukup besar.

Oleh karena itu, teramat penting untuk memberikan pemahaman keislaman yang berwawasan luas kepada para generasi muda sehingga tidak mudah terjebak dalam radikalisme yang dilatari oleh sempitnya wawasan keagamaan yang dimilikinya. Tampaknya, inilah salah satu kebutuhan yang coba dijawab dalam kurikulum PAI tahun 2002 tersebut.

Dengan melihat *setting* sosial masyarakat Indonesia di masa awal reformasi, maka materi yang ditawarkan dalam kurikulum PAI tahun 2002 tersebut sudah relevan. Masyarakat Indonesia di era reformasi ini membutuhkan pencerahan pemikiran keagamaan yang lebih luas, terutama menyangkut isu-isu krusial yang terjadi dalam negeri. Pemahaman yang benar tentang hak asasi manusia, demokrasi, masyarakat madani, pluralisme agama, ras, budaya, etnik dan bahasa.

Perubahan iklim politik di Indonesia ke arah yang lebih demokratis juga memberi peluang pada umat Islam untuk menyuarakan aspirasinya termasuk ide-ide yang bernuansa Islami. Olehnya itu, hubungan Islam dan politik perlu mendapat perhatian dalam kurikulum PAI, khususnya pada level Perguruan Tinggi.

Singkatnya, perubahan paradigma dan materi kurikulum PAI di Perguruan Tinggi tahun 2002 pada dasarnya merupakan

refleksi dari kebutuhan masyarakat muslim Indonesia di era reformasi ini. Kurikulum ini juga memungkinkan pendidikan untuk mengantar mahasiswa memahami wacana-wacana global dalam perspektif Islam. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat menumbuhkan cara pandang Islami dalam melihat realitas, sehingga Islam menjadi agama yang hidup dinamis dalam berdialog dengan segala bentuk perubahan konteks sosio kultural historis, tanpa harus kehilangan jati diri dan orisinalitasnya. Bila kita ingin menyakini Islam sebagai agama yang terakhir dari Allah swt, maka kita pun harus yakin bahwa wawasan keislaman akan mampu merespon kebutuhan masyarakat sepanjang zaman, Islam tidak mungkin statis karena realitas terus mengalami perubahan.

## **B. Relevansi Kurikulum PAI dengan kebutuhan Peserta Didik**

Istilah kebutuhan peserta didik disini bukan diartikan sebagai kebutuhan yang bersumber dari keinginan peserta didik secara personal, melainkan kebutuhan berdasarkan asumsi dengan melihat korelasi antara kurikulum PAI di tingkat Perguruan Tinggi dengan kurikulum PAI di tingkat dasar dan menengah. Sebagai ilustrasi, jika seorang anak didik telah mempelajari tata cara berwudhu, maka kebutuhan selanjutnya adalah materi tentang shalat atau tayammun, bukannya tata cara berwudhu lagi,

terlepas dari kenyataan bahwa diantara siswa masih ada yang belum menguasai tata cara berwudhu. Demikian juga, jika siswa belum pernah mempelajari tata cara berwudhu lalu materi yang diberikan langsung membahas tata cara shalat, maka pada dasarnya materi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya, meskipun mereka ingin mempelajarinya dan secara riil memang membutuhkannya.

Dengan demikian, kebutuhan peserta didik yang dimaksud disini adalah kebutuhan dari sudut pandang paedagogik. Secara sederhana, kebutuhan yang dimaksud adalah korelasi antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang telah dipelajari pada level sebelumnya.

Pada kurikulum PAI untuk tingkat SLTA tahun 2004 ruang lingkup materinya berfokus pada aspek : Al Quran/Al Hadits, Keimanan, Syari'ah, Akhlak, Tarikh. Sedangkan kompetensi dasar umum yang harus dicapai yaitu :

- a. Beriman kepada Allah SWT dan lima rukun iman yang lain dengan mengetahui fungsi dan hikmahnya serta terfleksikan dalam sikap, perilaku dan akhlak peserta didik dalam dimensi vertikal maupun horizontal.
- b. Dapat membaca, menulis dan memahami ayat-ayat Al Quran serta mengetahui hukum bacaannya dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Mampu beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam, baik ibadah maupun ibadah sunnah
- d. Dapat meneladani sifat, sikap dan kepribadian Rasulullah, sahabat dan tabi'in serta mampu mengambil hikmah dari sejarah perkembangan Islam untuk kepentingan hidup sehari-hari masa kini dan masa depan.
- e. Mampu mengamalkan sistem mu'amalat Islam dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- f. Berdasarkan pada paparan diatas, dapat diketahui bahwa materi Pendidikan Agama Islam pada tingkat SLTA telah membahas secara rinci pokok-pokok ajaran Islam dengan tiga domain utama yaitu akidah, syariah dan akhlak. Oleh karena itu, segogyanya materi-materi tersebut tidak lagi berulang pada tingkat Perguruan Tinggi.

Bahkan, disamping materi-materi pokok yang diajarkan dalam kelas, Pendidikan Agama Islam di tingkat SLTA juga ditunjang dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam pedoman kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk SLTA ditegaskan bahwa : kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam dapat mendukung kegiatan intrakurikuler, misalnya melalui kegiatan pesantren kilat, imtaq Ramadhan, peringatan hari-hari besar Islam, bakti sosial, shalat Jum'at, tahun baru islam, lomba baca tulis Al Quran (BTA), dan lain-lain. Dengan demikian, kebutuhan peserta

didik pada tingkat Perguruan Tinggi bukan lagi mengarah kepada persoalan-persoalan yang telah mereka pelajari di bangku SLTA, tetapi perluasan wawasan keislaman terutama yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer, baik yang berkembang di dalam negeri maupun dalam dunia internasional.

Bila materi Pendidikan Agama Islam di tingkat perguruan Tinggi hanya mengulang materi yang ada pada alevel sebelumnya, maka implikasi yang ditimbulkan antara lain :

1. Mahasiswa merasa jenuh dan menganggap remeh mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kesan yang muncul kemudian adalah mata kuliah ini hanyalah pelengkap SKS dan tidak memiliki nilai tambah terhadap pengetahuan mereka.
2. Wawasan keagamaan mahasiswa menjadi sempit, agama dipahami sekedar sebagai media pencucian diri, pemuasan spiritual, untuk memperoleh keselamatan di akhirat.
3. Sempitnya wawasan keagamaan mahasiswa tersebut menjadi sasaran empuk bagi propaganda kelompok radikal Islam, yang pada akhirnya melahirkan kelompok-kelompok radikal Islam di Perguruan Tinggi. Dan perlu dicatat, bahwa kelompok semacam ini, seperti disinyalir oleh Zaki Mubarak, lebih banyak berkembang di lembaga Perguruan Tinggi Umum. Sebagian kalangan berpandangan—meski masih membutuhkan penelitian lebih lanjut—bahwa radikalisme dan

fundamentalisme Islam lebih mudah tumbuh di Lembaga Perguruan Tinggi Umum dibanding lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam. Hal ini disebabkan karena di Perguruan Tinggi Umum, agama dipelajari sebagai “doktrin”, sedangkan di Perguruan Tinggi Islam, agama dikaji sebagai “ilmu”.

4. Pemahaman keagamaan mahasiswa terlepas dari kehidupan riil serta kondisi sosio kultural masyarakat, sehingga hal ini berpotensi melahirkan pandangan sekuler.

Untuk menghindari implikasi negatif di atas, maka materi pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum harus dihadirkan dengan wawasan yang luas dan kontekstual. Pada level inilah sebenarnya Islam dihadirkan dengan dimensi yang dinamis, moderat dan peka terhadap pluralitas serta menonjolkan karakteristiknya sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Jika hal ini masih dianggap “tabu” dibicarakan pada level Perguruan Tinggi, lalu pada level mana hal itu dianggap layak. Apakah hanya terbatas pada Perguruan Tinggi Agama Islam? Jika demikian cara berpikir kita, pada dasarnya kita sudah tersekulerkan secara tidak sadar.

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi semestinya mampu membentuk wawasan keislaman yang pada akhirnya melahirkan pandangan dunia yang islami. Inilah yang dibutuhkan anak didik dari proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka materi kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum tahun 2002, sudah cukup relevan dengan kebutuhan peserta didik, terutama bila dibandingkan dengan kurikulum PAI tahun 2000 sebelumnya.

Dari segi koherensinya dengan kurikulum PAI pada tingkat SLTA, maka kurikulum PAI pada PTU tahun 2002 tersebut sudah koheren dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada tingkat SLTA mereka digembleng dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Sedangkan pada tingkat Perguruan Tinggi mereka dibekali dengan perluasan wawasan keislaman dalam merespon persoalan-persoalan kontemporer, seperti : hak asasi manusia (HAM), demokrasi, pluralisme, masyarakat madani, sistem politik, manajemen zakat dan wakaf, toleransi antar umat beragama dan lain sebagainya.

Dalam melihat persoalan-persoalan kontemporer tersebut, tentu tidak berarti bahwa mahasiswa digiring untuk mengekor pada ide-ide Barat. Mengkaji HAM bukan berarti sepakat dengan pelaksanaan HAM yang dipraktekkan oleh Barat, tetapi memungkinkan untuk mengkritisnya dalam perspektif Islam. Begitu juga, membahas demokrasi bukan berarti mereka dipaksakan untuk menerima konsep demokrasi Barat secara mentah-mentah, sebaliknya mereka diperkenalkan pada konsep demokrasi dalam perspektif Islam yang menempatkan Tuhan sebagai pemegang



kedaulatan tertinggi dan rakyat (manusia) sebagai pemegang mandat kekhalifahan.

Dengan cara yang demikian, para sarjana muslim di masa depan, diharapkan memiliki komitmen keislaman yang kuat dengan memahami kesempurnaan Islam sebagai agama yang tidak hanya berurusan dengan keselamatan akhirat tetapi juga berkewajiban menciptakan kemakmuran di bumi (dunia).

## **Bab 5**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terdahulu, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Konteks sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia pada masa awal era reformasi, yang diduga kuat berpengaruh terhadap perubahan kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum antara lain : perubahan peta politik dengan kembalinya sistem multipartai, bergesernya sistem pemerintahan dari pola sentralistik menjadi sedentralistik, timbulnya konflik sosial yang bernuansa SARA di berbagai daerah, bangkitnya kebebasan pers, menguatnya isu hak asasi manusia (HAM), demokrasi dan pluralisme.
2. Terdapat pergeseran paradigma pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum tahun 2002 bila dibandingkan dengan paradigma yang digunakan pada kurikulum tahun 2000 sebelumnya. Kurikulum PAI tahun 2000 memosisikan Islam sebagai doktrin, harus diimani, diterima tanpa kritik, dan merupakan barang jadi yang siap

pakai. Sehingga materi yang disajikanpun hanya terfokus pada akidah, syariah dan akhlak menurut apa yang diwariskan oleh para ulama terdahulu. Pemahaman keagamaan, dengan demikian, cenderung bersifat statis dogmatis dan tidak peka terhadap konteks sosial budaya masyarakat. Sedangkan kurikulum PAI tahun 2002 memposisikan agama sebagai sesuatu yang dinamis dan hidup dalam setiap aspek kehidupan. Agama bukanlah sekedar seperangkat aturan normatif untuk memenuhi kebutuhan spritualitas manusia. Agama adalah sebuah pandangan hidup, dan dengan demikian agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang terhadap realitas kehidupan. Dan karena realitas selalu dalam proses perubahan maka konsep keagamaan haruslah bersifat dinamis dalam merespon kondisi kekinian. Oleh karena itu, materi yang disajikan dalam kurikulum PAI tahun 2002 ini tidak lagi mengulang-ulang materi yang telah dikaji pada tingkat dasar dan menengah, seputar akidah, syariah dan akhlak (dalam pengertian tradisional), tetapi cenderung membahas isu-isu kontemporer yang ditinjau dari sudut pandang Islam, seperti : hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, sistem politik, masyarakat madani dan sebagainya.

3. Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum tahun 2002, dengan muatan materi seperti yang disebutkan, sudah relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi sosio politik di masa awal era reformasi. Disamping itu, kurikulum tersebut juga relevan dengan kebutuhan peserta didik pada tingkat Perguruan Tinggi karena memiliki koherensi dengan materi kurikulum Pai pada tingkat SLTA sebelumnya. Sehingga dengan demikian, tidak terjadi pergulangan materi yang dapat melahirkan kesan membosankan, dan mahasiswa dapat mengembangkan wawasan keagamaannya dalam arti yang luas dan dinamis. Agama tidak lagi diartikan secara sempit sebagai sekumpulan doktrin untuk mengantarkan manusia meraih keselamatan hidup di akhirat, tetapi juga sebagai bagian yang hidup dalam keseharian, sebagai cara pandang dalam merespon kondisi sosial masyarakat, baik secara local maupun global.

## **B. Implikasi Penelitian**

Sejalan dengan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan di bagian akhir laporan ini sebagai implikasi dari penelitian yang telah dilakukan. Yaitu :

1. Dalam pelaksanaan kurikulum PAI untuk PTU tahun 2002, diperlukan pelatihan dan atau pendidikan khusus bagi para dosen PAI di PTU terkait dengan isu-isu tentang hak asasi manusia, demokratisasi dan pluralisme.
2. Mengingat bahwa pada level perguruan tinggi tidak ada lagi pembahasan tentang masalah ibadah rahdha, maka persoalan ini dan juga persoalan yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, hendaknya mendapat perhatian serius dari pada guru PAI pada tingkat dasar dan menengah. Artinya, pada tingkat Perguruan Tinggi mahasiswa diasumsikan telah memahami dengan baik dasar-dasar prinsipil ajaran Islam, sehingga yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah wawasan keislaman mereka.

## Daftar Pustaka

- al-Faruqi, 1968. dalam *Jurnal of Ecumenical Studies*, volume 5, No. 1, Winter.
- Arifin, Anwar. 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas*. Cet. ke-3. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag.
- Bachtiar, Wardi. 1997. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Cet.ke-1. Jakarta: Logos.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2007. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga
- Bodgan, Robert dan Steven J. Taylor. 1975. *Instrduction to Qualitative Research Method*. New York John Wiley & Sons.
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2004. *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI.
- Ellis, Arthur K., et al., 1986. *Introduction to the Foundation of Education*. New Jersey: Prentice-Hall, Engliwood Cliffs.
- Garis-garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Agama Islam dalam <http://bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/gbpp/gbpp-agamaislam>. diakses 11 Oktober 2017
- Keputusan Dikti Nomor: 263/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Depdiknas, 2000
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, Nomor: 38/DIKTI/KEP/2002 Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Mubarak, Zaki. 2008. *Geneologi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-4, Cet. ke-1. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mun'im DZ, Abdul. 28 September, 1998. *Reformasi Budaya untuk Reformasi Total*. Kompas.
- Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan. 2004. "Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

- Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah” dalam <http://elcom.ums.ac.id/>, diakses 11 Oktober 2017
- Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG Depdiknas. 2005. “Panduan Materi Pendidikan Agama Islam SD/MI-Kurikulum 1994” dalam <http://puspenk.com/ebatas/ajar2005/PDF/PAMSD94ISL05.pdf>, diakses 11 Oktober 2017
- Rahman, Darmawan Mas'ud, 2004. "Nilai Budaya dan Konflik: Sebuah Kajian Singkat Diamati dari Sudut Budaya Kekinian", Makalah disampaikan dalam seminar sehari STAIN Datokarama Palu, 20 Desember 2016.
- Sangkot. 2007. “Landasan Normatif Pendidikan Agama Islam Multikultural” dalam <http://sangkot.wordpress.com/2007/11/09/landasan-normatif-pendidikan-agama-islammultikultural>, diakses 10 Oktober 2008
- Supriyadi. 2003. “Studi Tentang Karakteristik Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Umum Tahun 1994” dalam <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2003-supriyadi9-262&q=Islam>, diakses 11 Oktober 2008



... dan ...  
 ... dan ...  
 ... dan ...

**DAFTAR ISI**



... dan ...  
 ... dan ...

... dan ...  
 ... dan ...

- ... dan ...
- ... dan ...
- ... dan ...
- ... dan ...
- ... dan ...

... dan ...

- ... dan ...
- ... dan ...
- ... dan ...

... dan ...

... dan ...



... dan ...  
 ... dan ...  
 ... dan ...



SURAT KETERANGAN

Nomor : 035/12/insan.cita/SK/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adiyatna Arifin. M.Pd  
Alamat : GRAHA INSAN CITA CURUP  
Jabatan : Kepala Toko

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/Peneliti : Fakhruddin  
Judul Penelitian : Relevansi Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum  
Dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peserta Didik di Era Reformasi  
Presentase : 22 % (Low Plagiarism)  
Perguruan Tinggi : IAIN Curup

Adalah benar-benar telah kami teliti dan check karya ilmiahnya tersebut diatas pada tanggal 11 Desember 2021 dengan metode software yang sudah terverifikasi oleh sistem internet (Turnitin & Plagiarism X Checker) sehingga dapat diketahui keabsahan karya tulis ilmiahnya untuk menghindari dari plagiat atau plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Admin Insan Cita Media,  
Adiyatna Arifin, M.Pd

**Awards & Certifications**

"PlagiarismCheckerX is an award winning software. Yes, we dislike boasting off but happily share our achievements and worldwide recognition. The positive reviews that we have received from numerous independent, industry-related organizations and testing agencies are additional. So, when you download the software, keep in mind that the scanning capabilities and innovative features of PlagiarismCheckerX have worldwide praise."

